

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018**



# **DINAS PERIKANAN**

**KOTA JAYAPURA  
2017**

**KATA PENGANTAR**

Pelaksanaan pembangunan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan perekonomian di Kota Jayapura, telah memberikan andil dalam menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas, kontribusi pendapatan asli daerah maupun peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, dengan perubahan tatanan kehidupan yang terus bergerak seiring berubahnya pola hidup yang merupakan ciri masyarakat dinamis, maka capaian-capaian yang telah dihasilkan tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun guna menjawab kebutuhan-kebutuhan jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap dalam suatu periode rencana strategis (rencana 5 tahunan), dengan target-target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan telah berakhirnya periode RENSTRA SKPD 2012-2016 dan tahun 2017 merupakan masa peralihan, perencanaan dan penyusunan RENSTRA periode berikut (2017 - 2022). Oleh sebab itu, RENJA pembangunan perikanan Kota Jayapura tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA SKPD tahun 2012-2016 serta kekuatan dan kelemahan internal maupun eksternal dan juga melalui 3 (tiga) pendekatan perencanaan, yakni; (1) Teknokratik, (2) Bottom up/Top Down, dan (3) Partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar materi Renja 2018 ini sedapat mungkin mengakomodir seluruh kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan perikanan secara khusus dan pembangunan Kota Jayapura secara umum.

Demikian Renja tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dan pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Daerah dalam mengakselerasi dan mensinergikan kinerja pembangunan daerah kedepan.

Jayapura, Maret 2017

KEPALA SKPD DINAS PERIKANAN  
KOTA JAYAPURA

ELSYE P. RUMBEKWAN, S.Pi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196508281997122001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	I
DAFTAR ISI	.....	li
 I. PENDAHULUAN	.....	1
1.1. Latar Belakang	.....	1
1.2. Landasan Hukum	.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	.....	3
 II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	.....	5
2.1. Evaluasi Perlaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	.....	18
2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	.....	33
2.4. Review dan Penyesuaian Rancangan Awal RKPD	.....	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	.....	45
 III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	.....	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	.....	49
3.3. Program dan Kegiatan	.....	50
 IV. PENUTUP	.....	53

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Kota Jayapura tahun 2017, guna penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2018, maka perlu disusun rencana kerja OPD yang akan dijadikan tolak ukur penyusunan program/kegiatan pembangunan tahun 2018.

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD Tahun Anggaran 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang berisikan rencana program dan kegiatan prioritas OPD dan pelaksanaannya nanti pada tahun anggaran 2018. Rencana program dan kegiatan tersebut dilakukan dari hulu ke hilir, meliputi perencanaan untuk; (1) meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keaneragaman produksi perikanan, (2) meningkatkan nilai jual dan nilai tambah, kualitas dan jaringan pemasaran hasil perikanan, serta (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Materi RENJA OPD ini disusun dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA SKPD yang telah diterjemahkan dalam program/kegiatan sejak tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal maupun eksternal, maka RENJA ini disusun melalui 3 (tiga) pendekatan perencanaan, yakni; (1) Teknokratik, (2) Bottom up/Top Down, dan (3) Partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar materi Renja 2018 ini sedapat mungkin mengakomodir seluruh kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mensukseskan pembangunan perikanan secara khusus dan pembangunan Kota Jayapura secara umum.

### **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa aturan yang menjadi dasar dan acuan penyusunan Renja OPD Tahun Anggaran 2018, adalah :

1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor :47);

2. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor : 68);
3. Undang - Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135);
4. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor :47);
5. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104);
6. Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
7. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 126);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungungan dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Renja Kerja (Renja) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dimaksudkan sebagai tolak ukur bagi penyusunan program/kegiatan tahun 2018, serta acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan tahun 2018.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Dinas Perikanan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capai Renstra OPD**

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review dan Penyesuaian dengan Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV. PENUTUP**

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD

Tahun anggaran 2016, merupakan tahun kelima (terakhir) dalam periode 2012-2016 Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2012 - 2016. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016, ada item kegiatan di dalamnya yang bersifat lanjutan dan ada yang bersifat baru, yang dimaksudkan untuk mendorong akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Jayapura.

Evaluasi capaian Renja tahun 2016 berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan acuan, dapat dijelaskan berikut ini.

#### 1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pada umumnya pelaksanaan Renja tahun 2016 telah sesuai dengan target yang direncanakan, namun ada beberapa target yang tidak tercapai sesuai yang direncanakan, yaitu :

##### a) Pengembangan Perikanan Budidaya

###### ➤ *Produksi Hasil Budidaya*

- ❖ Target produksi tahun 2016 = 13.813,78 ton (RENSTRA SKPD).
- ❖ Realisasi produksi tahun 2016 = 10.950,93 ton (tidak dapat mencapai target produksi).
- ❖ Penjelasan : Tidak tercapainya target produksi budidaya ini disebabkan karena produktivitas pembudidaya yang kurang dan penetapan target yang terlalu tinggi sehingga perlu dikaji kembali. Berdasarkan data statistik perikanan tahun 2016, luasan lahan budidaya ikan air tawar tidak mengalami peningkatan, walaupun demikian produksi budidaya tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 42,70% dari produksi tahun 2015. Peningkatan produksi yang cukup signifikan terjadi pada produksi budidaya kolam dan tambak sedangkan produksi budidaya keramba mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini menjadi perhatian Dinas terutama Bidang dan seksi yang bertanggungjawab secara langsung. Untuk usaha keramba ikan, baik di laut dan di air tawar,



pembudidayanya adalah masyarakat lokal yang produksinya amat bergantung kepada bantuan serta keamanan dalam menjalankan usaha.

#### **b) Pengembangan Sistem Perbenihan dan Revitalisasi Operasional BBIL**

##### **➤ *Produksi Benih di BBIL dan UPR***

- ❖ Target produksi tahun 2016 = 16.627.663 ekor (target RENSTRA SKPD), terdiri atas; (1) target benih dari BBIL = 700.000 ekor, (2) target benih dari UPR = 15.927.663 ekor.
- ❖ Realisasi target tahun 2016 = 4.507.460 ekor (teralisasi 27,11% dari target), terdiri atas; (1) produksi BBIL = 259.700 ekor, (2) produksi 23 UPR = 4.247.760 ekor.
- ❖ Penjelasan : Penyebab kegagalan pencapaian target produksi benih berkualitas pada tahun 2016 ini adalah (1) jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) mengalami penurunan dari 26 unit pada tahun 2015 menjadi 23 unit pada tahun 2016 sehingga mempengaruhi jumlah produksi benih dari UPR; (2) suplai air Bendungan Tami yang kurang lancar juga mempengaruhi tingkat produktivitas UPR dan BBIL.

Meski produksi BBIL mengalami peningkatan dari tahun 2015, ternyata kenaikan ini tetap tidak memenuhi target produksi benih tahun 2016 yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD sebesar 700.000 ekor. Hal ini disebabkan minimnya induk produktif.

##### **➤ *Sertifikasi UPR dan Pembudidaya***

- ❖ Target sertifikasi = 1 UPR dan 2 Pembudidaya (target RENSTRA 2016).
- ❖ Realisasi = sampai dengan akhir tahun 2016 tidak ada UPR dan Pembudidaya yang menerima sertifikasi atau 0% dari target yang ditentukan.
- ❖ Penjelasan : tidak tercapainya sertifikasi UPR dan Pembudidaya ini disebabkan karena kewenangan untuk melaksanakan penilaian kelayakan usaha budidaya (audit sertifikasi) berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, yang mana audit ini baru dilaksanakan pada akhir tahun 2016 (bulan Desember) dan masih

harus melalui prosedur sertifikasi di DITJEND Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Audit yang dilaksanakan hanya untuk Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sedangkan untuk Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) tidak dilaksanakan karena terkendala dana yang harus dirasionalisasikan.

**c) Fasilitas Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan**

➤ Sertifikasi Unit Pengolahan Hasil Perikanan

- ❖ Target 2016 = 7 unit (target RENSTRA SKPD).
- ❖ Realisasi = Sampai dengan tahun 2016, belum ada unit pengolahan ikan (UPI) yang tersertifikasi, atau 0% dari target yang ditetapkan yakni 7 (tujuh) unit.
- ❖ Penjelasan : Kendala utama yang dihadapi dalam proses sertifikasi UPI di Kota Jayapura adalah karena pada umumnya UPI yang ada merupakan UPI skala tradisional yang memiliki fasilitas bangunan pengolahan yang tidak memenuhi standar penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang ditetapkan (representatif) sehingga harus dibenahi kembali apabila akan disertifikasi ulang. Selain itu pelaksanaan proses sertifikasi terhambat karena pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua. Oleh sebab itu perlu koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif.

**2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja**

Sebagian besar kinerja realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016 mencapai target sesuai rencana yang ditetapkan dalam Renja dan disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan penjelasan sebagai berikut :

**a) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

➤ Pedampingan SISMASWAS

- ❖ Target pedampingan tahun 2016 diberikan untuk 5 Kelompok (target RENJA 2016).

- ❖ Realisasi target = 5 kelompok, yaitu : pedampingan SISMASWAS dilaksanakan untuk kelompok masyarakat pengawasan perikanan (POKMASWAS) di Kampung Kayu Batu, Kampung Tahima Soroma, Kampung Enggros, Kampung Tobati dan Kampung Skouw Yambe.
- ❖ Penjelasan : melalui pedampingan ini, POKMASWAS diberi pembinaan dan dilibatkan secara langsung dalam pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Pedampingan ini telah dilaksanakan sesuai target (100% terealisasi).

➤ **DIKLAT PPNS**

- ❖ Target peserta DIKLAT = 1 orang (sesuai target RENJA 2016)
- ❖ Realisasi target = 1 orang aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- ❖ Penjelasan : kegiatan ini untuk menyediakan tenaga aparatur yang berkompetensi dan memiliki sertifikasi untuk menegakkan peraturan yang berlaku di lingkup kelautan dan perikanan di Indonesia. Pada tahun 2016 ditugaskan 1 orang staf Bidang PSDKP untuk mengikuti DIKLAT PPNS di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal POLRI Mega Mendung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dengan demikian kegiatan ini telah 100% terrealisasi sesuai target.

**b) Perlindungan Ekosistem Pesisir**

➤ *Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir*

- ❖ Target volume dan sasaran MONEV tahun 2016 = 2 kali untuk 3 obyek MONEV di 3 lokasi (target Renja 2016).
- ❖ Realisasi target = 2 kali, yaitu; (1) 1 kali untuk monitoring dan evaluasi perkembangan transplantasi terumbu karang di Kampung Tahima Soroma serta fish apartement di Kampung Holtekamp dan Tahima Soroma; (2) 1 kali untuk monitoring dan evaluasi perkembangan penanaman pohon pantai di samping Ringroad Pantai Wisata Hamadi (seluruhnya terealisasi 100% sesuai target)
- ❖ Penjelasan :  
Merupakan item kegiatan lanjutan pada Program/Kegiatan ini untuk memantau dan mengevaluasi upaya pemulihan ekosistem pesisir

dan laut tahun sebelumnya baik keberhasilan maupun kegagalannya. Tujuannya, mendapat masukan untuk perencanaan program/kegiatan tahun berikutnya. Sasaran kegiatan ini telah terrealisasi 100% sesuai target.

- *Magang Masyarakat Daerah Konservasi Penyu ke Kabupaten Sukabumi*
  - ❖ Target tahun 2016 = 8 orang dimana 6 orang masyarakat sasaran, dan 2 orang pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan (target RENJA).
  - ❖ Realisasi target = 8 orang dimana 6 orang masyarakat dari Kampung Skouw Yambe, dan 2 orang pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan (terrealisasi 100% sesuai target).
  - ❖ Penjelasan : merupakan item kegiatan lanjutan tahun 2015, yang dikhususkan bagi kelompok pemerhati penyu dari Kampung Skouw Yambe. Lokasi tujuan magang adalah UPTD Pengumbahan-Kabupaten Sukabumi. Magang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan anggota kelompok pemerhati penyu dari Kampung Skouw Yambe tentang tata cara pengelolaan Konservasi Penyu dengan pendekatan kawasan, serta implikasinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

### **c) Pengembangan Sistem Perbenihan**

- Sarana Produksi Perbenihan dan Budidaya
  - ❖ Target = 25 paket Saprodi perbenihan dan 39 paket Saprodi budidaya (target RENSTRA SKPD)
  - ❖ Realisasi = terrealisasi 100% sesuai target.
  - ❖ Penjelasan = untuk kegiatan bantuan hibah sarana produksi ini pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR) dan Pembudidaya Ikan. Walaupun kegiatan bantuan ini telah terlaksana dengan baik tetapi masih dibutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan usaha budidaya yang optimal sehingga dapat menunjang peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya.

#### d) Fasilitasi Perkembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

##### ➤ *Pembinaan dan Pendampingan Unit Pengolahan Ikan*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2015 = 12 kali di sentra-sentra ikan asap (target RENSTRA 2015)
- ❖ Realisasi target = 12 kali terhadap pengolah ikan asap di sentra ikan asap (terrealisasi 100% / sesuai target).
- ❖ Penjelasan : Upi yang dibina adalah pengolah ikan asap sebanyak 11 orang. Dilakukan setiap bulan, dan berpindah tempat secara bergilir pada 11 pengolah hasil perikan sasaran yang tersebar di Kelurahan Hamadi, Kelurahan Imbi, Kelurahan Argapura dan Kelurahan Abepura. Pembinaan dan pendampingan dilakukan melalui diskusi dan praktek.

Diskusi, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan produksi pengolahan hasil perikanan beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan usaha. Praktej yang dilaksanakan adalah praktek pengolahan ikan asap dan praktek pembuatan abon ikan lele. Praktek pengasapan, dilakukan bersama 10 pengolah hasil perikanan dengan tujuan agar bisa melihat secara langsung proses pengasapan ikan yang sehari-hari dilakukan oleh pengolah ikan asap, membina dan mendampingi mereka secara perlahan untuk menerapkan proses pengasapan ikan yang baik dan benar. Praktek pembuatan abon ikan lele, praktek ini dilakukan sesuai permintaan dari ibu-ibu pengolah hasil perikanan di Kampung Koya Koso, mengingat di Kampung ini diterapkan budidaya ikan lele sehingga guna meningkatkan produksinya, perlu juga didukung dengan hasil olahan yang tepat. Selain itu, praktek ini juga bertujuan untuk memperkenalkan produk abon ikan lele dan meningkatkan minat usaha.

##### ➤ *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan*

- ❖ Target pengadaan tahun 2016 = 19 paket (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 19 paket (terrealisasi 100% / sesuai target).
- ❖ Penjelasan : ke- 19 paket pengadaan ini dimaksudkan sebagai bantuan hibah kepada 19 orang pengolah ikan asap di Kota

Jayapura. Penerima bantuan hibah ini diseleksi dan diverifikasi sesuai ketentuan teknis yang diberlakukan di dinas, selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Jayapura nomor 95 tahun 2016 tanggal 21 April 2016. Tujuannya, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil usaha. Pelaksanaan penyediaan barang dan penyaluran bantuan berlangsung dengan baik tanpa hambatan.

**e) Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan**

- *Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)*
  - ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 6 kali (target RENJA 2016).
  - ❖ Realisasi target = 6 kali (terrealisasi 100%/ sesuai target).
  - ❖ Penjelasan : kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan untuk memperkenalkan fungsi dan manfaat makan ikan kepada anak sekolah, sekaligus memperkenalkan aneka olahan makanan berbahan dasar ikan yang sehat dan bergizi. Tujuannya, mensukseskan Program GEMARIKAN dalam rangka mendukung terciptanya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan kuat, serta memenuhi target Angka Konsumsi Ikan Kota Jayapura, sebesar 34 Kg/Kapita/tahun. Sasaran sosialisasi ini adalah, anak-anak SD pada sekolah-sekolah yang 80% anak didiknya adalah anak Papua dengan ekonomi keluarga menengah ke bawah. Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 kali yang berlokasi di 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) Kota Jayapura.
- *Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Dasar Ikan (PMTI) di Posyandu*
  - ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 5 kali (target RENJA 2016).
  - ❖ Realisasi target = 5 kali (terrealisasi 100%/ sesuai target).
  - ❖ Penjelasan : merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan secara bergilir antar POSYANDU untuk menumbuhkan GEMARIKAN masyarakat Kota Jayapura, terutama ibu hamil, menyusui, dan BALITA. Tujuannya, menjamin gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan kuat, dan juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs).

Sosialisasi dilaksanakan di 5 (lima) Posyandu yang mewakili 5 (lima) Distrik di Kota Jayapura, dengan ketentuan sebagian besar anak-anak dan kader Posyandu merupakan orang asli Papua.

➤ *Pameran Promosi Produk Olahan Hasil Perikanan*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 1 kali (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 1 kali (terrealisasi 100%/ sesuai target).
- ❖ Penjelasan : Pameran ini dimaksudkan untuk memperkenalkan aneka produk olahan ikan yang sehat bergizi, serta memperkenalkan produk olah perikanan non konsumsi (ikan hias, kekerangan) kepada masyarakat. Disamping itu dimaksudkan juga untuk turut memeriahkan HUT RI ke-71. Tujuan dari pameran ini adalah, (1) memenuhi target Angka Konsumsi Ikan tahun 2016 sebesar 36,00 Kg/Kapita/Tahun, (2) mensukseskan program GEMARIKAN, (3) mendukung upaya menaikkan nilai tambah dan nilai jual hasil perikanan, dan (4) meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

➤ *Lomba Masak Serba Ikan*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 1 kali (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 1 kali (terrealisasi 100%/ sesuai target).
- ❖ Penjelasan : lomba ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional yang ke-3 Tahun 2016. Diikuti oleh 50 Orang peserta yang berasal dari PKK (Tingkat Kota, Distrik, Kelurahan, Wanita Gereja dan Masjid, Darma Wanita, dan Organisasi Wanita lainnya. Lomba dimaksudkan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah ikan sekaligus sebagai ajang promosi bahwa, ikan dapat diolah menjadi menu kuliner yang menarik, sehat, dan bergizi. Tujuan dari lomba ini adalah, (1) mensukseskan program GEMARIKAN, (2) mendukung upaya menaikkan nilai tambah dan nilai jual hasil perikanan, (3) meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan (4) mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan, kecerdasan, sehat, dan fisik.

#### f) Fasilitas Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

##### ➤ *Survei dan Pemantauan Mutu Hasil Perikanan Perikanan*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2015 = 6 kali (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 6 kali (terrealisasi 100%/ sesuai target).
- ❖ Penjelasan : Survei ini ditujukan untuk memantau produk perikanan yang dipasarkan, baik di pasar tradisional, pusat distribusi ikan, maupun pasar retail. Maksudnya, untuk mengetahui mutu dan keamanan hasil perikanan (kandungan formalin tambahan dan kuantitatif *Escherichia coli*) yang dipasarkan dalam rangka melindungi konsumen ikan di Kota Jayapura. Pada survei ini juga dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang penerapan syarat-syarat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil dan produk perikanan yang dipasarkan, serta ketentuan hukum yang berlaku bila dilanggar. Survei ini dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait, sehingga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang kontinu dalam hal pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Sasaran survei ini adalah hasil dan produk perikanan yang dipasarkan di berbagai tempat pemasaran di wilayah Kota Jayapura.

#### g) Operasional Outlet Pemasaran Hasil Perikanan

##### ➤ *Operasional Outlet*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 1 tahun (target RENSTRA SKPD).
  - ❖ Realisasi target = 1 tahun (terrealisasi 100%/ sesuai target).
  - ❖ Penjelasan : merupakan kegiatan rutin untuk pembiayaan kebutuhan pengelolaan fasilitas outlet pemasaran sebagai salah satu Unit Pelaksana teknis pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- ##### ➤ *Praktek Pengolahan Ragam Produk Perikanan dan Uji Organoleptik*
- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 3 produk (target RENJA 2016).
  - ❖ Realisasi target = 3 produk olahan (terrealisasi 100%/ sesuai target).



Penjelasan : merupakan item kegiatan yang bersifat temporer berdasarkan kebutuhan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : (1) mengembangkan ragam produk olahan hasil perikanan sesuai potensi perikanan di Kota Jayapura, dan (2) sebagai masukan untuk memberikan rekomendasi diversifikasi ragam produk berdasarkan metode hasil uji organoleptik yang terbaik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya ragam produk hasil perikanan yang bermutu, aman dan higienis, serta memiliki cita rasa khas yang dapat menaikkan nilai jual dan memberikan nilai tambah. Olahan hasil perikanan yang dipraktekkan dan diujiorganoleptikkan adalah olahan bakso ikan lele, olahan nugget ikan tuna dan olahan ikan asap/asar menggunakan metode asap cair.

#### **h) Monitoring/Evaluasi dan Penyediaan Data/Informasi Kelautan dan Perikanan**

##### **➤ *Monitoring dan Evaluasi Internal***

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 6 kali (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 6 kali (terrealisasi 100% sesuai target)
- ❖ Penjelasan : merupakan item kegiatan rutin yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD selama tahun berjalan sehingga hasil kegiatan tepat perencanaan dan selesai tepat waktu/jadwal yang telah ditentukan, dan tepat pertanggung jawaban.

##### **➤ *Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan***

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 4 triwulan/1 tahun (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 4 triwulan/1 tahun (terrealisasi 100% sesuai target).
- ❖ Penjelasan = merupakan item kegiatan lanjutan yang bersifat rutin yang bertujuan menyediakan data base untuk kepentingan penyediaan Data Statistik Perikanan, sekaligus sebagai bahan

evaluasi dampak program/kegiatan pembangunan kelautan perikanan tahun sebelumnya terhadap produksi perikanan. Dilaksanakan setiap triwulan dengan petugas pendataan statistik sebanyak 11 orang dan petugas pengolah data statistik sebanyak 4 orang yang semuanya merupakan staf Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah data statistik perikanan di laporan tahunan SKPD tahun 2016.

➤ *Pemantauan Kualitas Air Budidaya di Kawasan Minapolitan*

- ❖ Target pelaksanaan tahun 2016 = 2 kali (target RENJA 2016).
- ❖ Realisasi target = 2 kali (terrealisasi 100% sesuai target).
- ❖ Penjelasan : merupakan item kegiatan baru yang bertujuan menyediakan data awal tentang suhu, salinitas, oksigen terlarut dan derajat keasaman yang terdapat pada kolam budidaya ikan di kawasan pengembangan minapolitan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode sampling.

### **3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melampaui Target Kinerja**

Berdasarkan evaluasi kinerja realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2016, terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja yang direncanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **a) Perlindungan Ekosistem Pesisir**

➤ *Penanaman Pohon Pelindung Pantai (Mangrove)*

- ❖ Target jumlah pohon tahun 2016 = 800 pohon mangrove (target RENSTRA SKPD).
- ❖ Realisasi target = 2.700 pohon mangrove dengan lokasi penanaman samping Ringroad pantai Wisata Hamadi.
- ❖ Penjelasan : merupakan item kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk memulihkan kembali ekosistem pesisir yang luasan vegetasinya telah berkurang karena penebangan dan konversi lahan. Tujuannya, memulihkan aliran energi dan pengkayaan sumber daya ikan di pesisir dan laut. Pelaksanaan item kegiatan ini melibatkan masyarakat pesisir dan mahasiswa. Penanaman pohon pantai pada tahun 2016, menambah luasan lahan rehabilitasi

sebesar 2 Ha. Bila dibandingkan dengan target 2016 kegiatan ini melampaui target sebesar 237% tetapi bila dibanding dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 item kegiatan ini mengalami penurunan dalam jumlah pohon yang ditanam sebesar 13%. Pada tahun 2015 jumlah pohon pantai yang ditanam adalah sebanyak 3110 pohon. Penurunan ini terkait dengan alokasi pendanaan.

#### **b) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

##### **➤ *Patroli pengawasan***

- ❖ Target patroli tahun 2016 = 12 kali (target RENSTRA SKPD).
- ❖ Realisasi target = 17 kali, (terrealisasi 141,67% melampaui target).
- ❖ Penjelasan : Pada kegiatan ini selain dilakukan patroli untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya dan komoditi kelautan perikanan secara terpadu, dilakukan juga penertiban ijin-ijin usaha perikanan. Patroli ini dilakukan secara interen, dilakukan juga kerjasama lintas sektor dengan melibatkan POLAIR, TNI AL dan SATKER PSDKP Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua.

Patroli pengawasan perikanan dilakukan sebanyak 17 kali yaitu tangkap 8 kali, budidaya 7 kali dan pengolahan hasil perikanan 2 kali. Kasus yang ditemukan dalam patroli sebagai berikut 2 armada/kapal ikan memiliki ijin usaha yang sudah berakhir (mati), 5 perahu yang ijin usahanya telah berakhir dan 40% pembudidaya yang belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Pada saat patroli juga dilakukan pembinaan bagi pelaku usaha perikanan yang ijin usahanya telah berakhir.

#### **c) Pengembangan Perikanan Tangkap**

##### **➤ Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**

- ❖ Target produksi tahun 2016 = 24.222,77 ton (target RENSTRA SKPD).
- ❖ Realisasi target = 45.661,50 ton (terlampau 188,51% dari target).
- ❖ Penjelasan : terlampauinya target produksi perikanan tangkap ini didukung oleh adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap

yang diberikan kepada nelayan, serta pola arus dan musim yang menyebabkan kelimpahan produksi pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September.

**d) Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan**

➤ **Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan**

❖ Target peningkatan SDM tahun 2016 = 151 orang (target RENSTRA SKPD).

❖ Realisasi target = 430 orang (terrealisasi 284% dari target).

❖ Penjelasan : kegiatan pembinaan SDM kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terstruktur serta uji pengetahuan dan ketangkasan. Diharapkan lewat pelatihan dan uji ini pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan) mampu menerima/mengikuti program pengembangan usaha secara nasional.

Terlampauinya target kegiatan ini karena kemauan dari pelaku usaha untuk meningkatkan usaha dan daya saingnya dengan memanfaatkan pelatihan-pelatihan dan uji ketangkasan yang diadakan oleh Dinas.

➤ ***Penyuluhan/Sosialisasi Kelautan dan Perikanan***

❖ Target tahun 2016 = 72 orang (target RENSTRA SKPD)

❖ Realisasi target = 250 orang (melampaui 347% dari target)

❖ Penjelasan : kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi baru/mengingatkan pelaku usaha perikanan tentang hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan/mempertahankan usaha sehingga dapat survive, terjamin kualitas, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan meliputi; (1) Sosialisasi Ijin Usaha, (2) Sosialisasi Konservasi Penyus, dan (3) Sosialisasi GEMARIKAN di tingkat Distrik. Terlampauinya target kegiatan ini karena dukungan dana dari APBD dan keingintahuan masyarakat perikanan akan informasi terbaru/terkini di bidang kelautan dan perikanan.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sebagai salah satu OPD yang melaksanakan kebijakan pembangunan Kota Jayapura di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, kinerja Dinas Perikanan Kota Jayapura dicapai melalui 3 (tiga) bidang pelayanan, yaitu:

### 1) Pelayanan Bidang Produksi

Pelayanan di bidang produksi difokuskan untuk menaikkan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura, dengan implementasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Pelayanan pembangunan pada bidang ini meliputi; pengembangan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan aplikasi teknologi terapan yang murah, muda, dan tepat guna. Tujuan akhir dari pembangunan bidang ini adalah menaikkan jumlah produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Pelayanan pada bidang ini terbagi atas 2 jenis pelayanan yaitu:

#### a) Pelayanan Perikanan Budidaya

Pelayanan pada seksi ini meliputi; pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya, aplikasi teknologi budidaya ikan yang adaptif, dan upaya peningkatan kualitas SDM manusia perikanan budidaya.

#### ➤ *Pelayanan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi budidaya mencakup;*

- (1) Penyediaan kelengkapan dan sarana pendukung budidaya dan perbenihan ikan, serta rehabilitasi beberapa fasilitas di BBIL untuk menunjang peningkatan produksi benih yang berkualitas (terrealisasi 100% sesuai target).
- (2) Guna meningkatkan kualitas usaha budidaya dan menumbuhkan semangat wirausaha pada POKDAKAN, maka melalui alokasi APBN KKP-RI (Dana TP-Budidaya), dilaksanakan Denfarm budidaya yang melibatkan 4 kelompok pembudidaya. Dengan komoditas pengembangan ikan nila (komoditas unggulan daerah) (terrealisasi 100% sesuai target).
- (3) Untuk menunjang keberlanjutan usaha budidaya, maka lewat dukungan DIRJEND Budidaya KKP-RI, diberikan Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) berupa modal usaha melalui Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan. Diberikan kepada 2 POKDAKAN yang dipandang terbatas dalam akses permodalan ke perbankan. Dukungan KKP-RI (DIRJEND Perikanan Budidaya) ini dimaksudkan untuk akselerasi program Minapolitan Budidaya percontohan, serta meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kota Jayapura (terrealisasi 100% sesuai target).

➤ *Pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM perikanan budidaya mencakup;*

- (1) Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Anjuran Budidaya Ikan Nila di Kolam bagi 35 orang pembudidaya ikan di Distrik Muara Tami. Sekolah lapang dilaksanakan sebanyak 7 kali selama 1 siklus budidaya ikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pedoman/acuan bagi pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan teknologi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Pelatih pada sekolah lapang ini berasal dari Seksi Budidaya Bidang Produksi (terrealisasi 100% sesuai target).
- (2) Pedampingan usaha dan evaluasi pemanfaatan paket bantuan yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Petugas yang melaksanakan pedampingan dan evaluasi adalah dari seksi Budidaya Bidang Produksi. Tujuan dari pedampingan usaha adalah memberikan motivasi dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pembudidaya dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuan dari evaluasi pemanfaatan paket bantuan adalah memantau pemanfaatan dari paket bantuan yang telah diberikan pada tahun sebelumnya sehingga lebih tepat sasaran.

(3) Kegiatan Asah Terampil.

Pada kegiatan ini dilaksanakan Lomba Ketangkasan dan Pengetahuan tentang Perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha perikanan, menumbuhkan keberanian dan tekad kuat untuk berkompetisi sehat dalam mengembangkan usahanya serta

memupuk rasa kekeluargaan dan keakraban antar pelaku usaha perikanan. Lomba yang diikuti oleh pembudidaya ikan adalah ketangkasan menangkap belut dan pengepakan benih ikan nila serta cerdas cermat pengetahuan tentang perikanan budidaya (teralisasi 100% sesuai target)

➤ *Pelayanan melalui penerapan aplikasi teknologi budidaya ikan yang adaptif;*

Pelayanan melalui penerapan aplikasi teknologi budidaya ikan yang adaptif dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pembudidaya, terkait ketersediaan benih, keterbatasan lahan, keterbatasan pupuk, keterbatasan modal untuk pembelian pakan ikan. Dilakukan melalui Uji Coba, Sekolah Lapang, Pendampingan Rutin, dan Pemberian Brosur/Leaflet. Pada tahun 2016, diberikan dalam bentuk leaflet tentang teknologi perbenihan ikan air tawar (Lele, Mas dan Nila) dan ex banner tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Tujuannya, agar UPR dan pembudidaya ikan tetap mengingat hal-hal teknis yang telah dilakukan melalui pembinaan/pendampingan lewat Sosialisasi, Pelatihan dan Sekolah Lapang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 (teralisasi 100% sesuai target).

Pembiayaan pengembangan perikanan budidaya di Kota Jayapura tahun 2016 dialokasikan melalui; APBD Kota Jayapura (DAU, DAK dan OTSUS) dan APBN (DIRJEN Perikanan Budidaya-KKP-RI). Dukungan pembiayaan ini turut andil dalam menunjang produksi ikan konsumsi maupun benih berkualitas.

Meski berbagai upaya tersebut telah dilakukan, capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 tidak dapat memenuhi target produksinya pada tahun tersebut. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di depan. Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 adalah sebesar 10.950,93 ton (hanya terealisasi 79,28% dari target sebesar 13.813,78 ton). Capaian produksi benih tahun 2016

adalah sebesar 4.507.460 ekor (hanya terealisasi 27,11% dari target sebesar 16.627.663 ekor).

b) Pelayanan Perikanan Tangkap

Pelayanan pada seksi ini meliputi; pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap, aplikasi teknologi untuk pengkayaan sumberdaya ikan yang adaptif, dan upaya peningkatan kualitas SDM manusia perikanan tangkap.

➤ *Pelayanan melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap*

- (1) Pemberian bantuan alat tangkap berupa, 50 ball bahan jaring kepada 50 orang nelayan pesisir (terealisasi 100% sesuai target).
- (2) Pemberian alat bantu penangkapan berupa, 5 unit rumpon dan 15 unit Fish Finder (terealisasi 100% sesuai target).
- (3) Revitalisasi armada tangkap berupa, 15 unit motor tempel 15 HP, (terealisasi 100% sesuai target).
- (4) Bantuan sarana penanganan hasil tangkapan berupa, 57 unit Coolbox 200 liter dan 16 unit coolbox 70 liter (terealisasi 100% sesuai target).

Bantuan sarana penangkapan ikan dan penanganan ikan diatas kapal ini di biyai lewat alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan serta alokasi dana OTSUS 2015. Penerima bantuan ini adalah nelayan yang berdomisili di Kota Jayapura

Berbagai bantuan tersebut turut memberikan andil pada peningkatan produksi tangkap pada tahun 2016. Capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 adalah sebesar 45,661,50 ton (terlampaui 88,51% dari target sebesar 21.438,73 ton).

Selain pengembangan sarana prasarana produksi, untuk mendukung pencapaian target kinerja, dilakukan juga penerapan teknologi adaptif dan pengembangan serta peningkatan SDM perikanan tangkap.



➤ *Pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas SDM manusia perikanan tangkap*

(1) Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan yang diberikan untuk 50 orang peserta dan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha perikanan tentang pentingnya legalitas suatu usaha khususnya usaha perikanan tangkap. Tujuannya meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan. Manfaat yang dapat diperoleh dari kepemilikan Ijin Usaha Perikanan adalah sebagai sarana perlindungan hukum.

(2) Kegiatan Asah Terampil.

Pada kegiatan ini dilaksanakan Lomba Ketangkasan dan Pengetahuan tentang Perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha perikanan, menumbuhkan keberanian dan tekad kuat untuk berkompetisi sehat dalam mengembangkan usahanya serta memupuk rasa kekeluargaan dan keakraban antar pelaku usaha perikanan. Lomba yang diikuti oleh nelayan adalah lomba jahit jaring dan cerdas cermat pengetahuan tentang perikanan tangkap (teralisasi 100% sesuai target).

Uraian pelayan pada perikanan tangkap dan budidaya di atas, menunjukkan perhatian pemerintah sangat besar pada sub sektor kelautan dan perikanan guna mendukung peningkatan produksi, peningkatan konsumsi ikan, dan peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan terutama nelayan dan pembudidaya ikan.

## **2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Pelayanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran difokuskan untuk menaikkan nilai tambah dan nilai jual produk perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, serta memenuhi kebutuhan konsumsi ikan.

Analisis kinerja pelayanan bidang P2HP, berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2012-2016 dilaksanakan melalui Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan, guna

mencapai target kinerja program (outcome) yaitu meningkatkan konsumsi ikan, serta meningkatkan ragam dan volume pemasaran produk perikanan. Upaya pencapaian outcome ini dilakukan dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menekankan bahwa, pembangunan ketahanan pangan harus berbasis kepada kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemenuhan pangan untuk masyarakat hendaknya juga memenuhi kriteria bermutu, aman, beragam, bergizi dan terjangkau.

a) Meningkatkan Konsumsi Ikan

Pada taun 2004, telah dicanangkan Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) oleh Presiden Megawati Sukarno Putri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan Indonesia, dimana sebagai negara kepulauan, pasokan protein hewani asal ikan sangatlah penting sebagai penunjang pola pangan harapan (PPH).

Konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti, (1) Pengetahuan gizi dan teknik mengolah ikan yang masih terbatas, (2) Kemudahan mendapatkan ikan yang bervariasi, (3) Harga ikan yang dinilai bergensi (udang, cumi, kerapu, dll) cukup mahal dibandingkan daya beli masyarakat pada umumnya, (4) Citra/gensi/image ikan sebagai makanan utama pada acara-acara khusus belum berkembang, (5) Image/pemahaman akibat negatif makan ikan (cacingan, dll) dan (6) Promosi konsumsi ikan.

Pada tahun 2011, sebagai tahun awal perencanaan Renstra SKPD 2012-2016, tercatat konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura sebesar 33 kg/kapita. Perkembangan sampai tahun 2016, tingkat konsumsi ikan mengalami peningkatan menjadi 38 kg/kapita dari target 34 kg/kapita. Angka ini melewati target sebesar 11,76 persen dan meningkat 13,20 persen dari capaian tahun 2015, sebesar 33,57 kg/kapita.

Peningkatan konsumsi ikan ini dapat dijadikan gambaran adanya peningkatan kesadaran dan perubahan pola konsumsi pada bahan pangan hewani yang lebih aman dan sehat. Walaupun kecil angka

peningkatannya, namun bila dibandingkan dengan pertumbuhan daerah Kota Jayapura, khususnya penambahan penduduk dan upaya pemenuhan pasokan kebutuhan ikan, maka angka tersebut cukup menggembirakan, ditengah berbagai permasalahan yang terjadi seputar aktivitas produksi perikanan (tangkap dan budidaya).

Pencapaian kenaikan angka konsumsi ikan masyarakat Kota Jayapura tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan output (kegiatan) tahun 2016, antara lain :

(1) Pelayanan promosi produk perikanan

Dilakukan dan dikemas dalam Program Nasional gerakan memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Dilakukan melalui; Sosialisasi, Penyuluhan, Pameran, Lomba Masak/Kuliner, Bazar, Quis dan Seminar.

Pada tahun 2016, dilaksanakan Sosialisasi GEMARIKAN (11 kali), Penyuluhan dan PMTI (5 kali), Pameran (1 kali) dan Lomba Kuliner Berbahan Dasar Ikan (1 kali). Kegiatan-kegiatan tersebut kedepannya akan terus difasilitasi secara lebih komprehensif melalui sinergi kerjasama kelembagaan terpadu yang dinamakan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Jayapura, yang telah dibentuk dan dilantik pada tahun 2016.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebanyak 7 kali, terealisasi 18 kali. Kegiatan ini, pada realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 49 kali dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 30 kali, atau tercapai 163,33 persen. Prakiran ini didasarkan pada kondisi saat ini dimana dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat maksimal dalam menunjang pelaksanaan GEMARIKAN.

(2) Pelayanan pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan

Merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah, untuk menjamin keamanan dan kesehatan konsumen/masyarakat, mengingat semakin maraknya penggunaan atau penambahan bahan pengawet berbahaya dalam produk perikanan, seperti Formalin dan Boraks oleh pihak-pihak produsen maupun penjual

tertentu, yang ingin mencari keuntungan dengan cara-cara illegal. Pemantauan kualitas/mutu produk juga dilakukan untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat, benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi (tidak busuk). Pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan dilakukan terhadap produk perikanan yang beredar dipasar grosir maupun retail, dilakukan dengan melibatkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Balai Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BKIPMHP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua. Sasaran pengawasan adalah pada beberapa pusat perbelanjaan/pasar, seperti Hipermart, Hola Plaza, Mega Supermarket, Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebanyak 4 kali, terealisasi juga sebanyak 6 kali. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 22 kali dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 18 kali, atau tercapai 122,22 persen. Prakiraan terlampauinya target ini karena adanya dukungan maksimal oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan.

- b) Meningkatkan ragam dan volume pemasaran produk olahan hasil perikanan.

Penganekaragaman (diversifikasi) produk olahan, untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk, menjadi tantangan tersendiri untuk diperhatikan. Dengan bergesernya paradigma pilihan konsumsi bahan pangan protein hewani dari daging ke ikan, memberikan tantangan sekaligus menjadi potensi dalam penganekaragaman produk hasil perikanan, guna menyediakan pilihan-pilihan produk bagi masyarakat.

Untuk menjadikan pilihan utama dalam komposisi menu masyarakat, maka kualitas dan kuantitas produk menjadi "harga mati" yang harus dipenuhi.

Produksi olahan hasil perikanan, mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan RENSTRA SKPD Tahun 2012 - 2016, produksi olahan sampai tahun 2016 ditargetkan sebesar 2.284,53 ton, realisasi

produksi olahan yang dicapai sebesar 3.507,82 ton atau terlampaui 53,55%.

Bila dikumulatikan tingkat produksi sejak tahun 2012 - 2015, maka telah tercapai 7.850,77 ton. Bila tambahkan capaian produksi tahun 2016 sebesar 3.507,82 ton, maka pada akhir tahun 2016 atau akhir periode RENSTRA SKPD, tercapai 11.358,59 ton atau melampaui target sebesar 23,37 persen (123,37 persen).

Produk olahan hasil perikanan di Kota Jayapura masih didominasi oleh olahan ikan asap/ikan asar berbahan dasar ikan TCT (tuna, cakang, tongkol). Ikan tuna, selain dijadikan ikan asap, diolah juga menjadi produk abon, baik dalam bentuk original maupun abon tuna asar. Pada tahun 2016, diperkenalkan metode baru cara pengolahan ikan asap yaitu metode asap cair. Pelatihan untuk cara pengolahan ikan asap cair ini telah diberikan kepada ibu-ibu kelompok pengolah ikan asap/asar di Kota Jayapura.

Usaha pengolahan lain yang berkembang di Kota Jayapura adalah pengolahan surimi dan ikan bandeng. Berkembangnya sentra usaha pengolahan ikan bandeng tidak lepas dari potensi budidaya air payau (bandeng) di Kota Jayapura yang memiliki luas produksi hingga 578 Ha pada tahun 2011. Produk olahan yang dikembangkan adalah Bandeng Presto, Bandeng Cabut Duri, Abon Bandeng. Usaha pengolahan lainnya adalah Baby Nila Crispy, yang berkembang di Kelurahan Koya Barat-Distrik Muara Tami. Produk ini cukup berpotensi untuk dikembangkan karena didukung ketersediaan bahan baku lokal dan sangat diminati oleh masyarakat Kota Jayapura.

Selanjutnya, Produk olahan lainnya seperti ikan asin dan teripang kering, sifatnya masih bersifat musiman karena tergantung ketersediaan bahan.

Pencapaian kenaikan ragam dan volume produk perikanan ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan output (kegiatan) tahun 2016, antara lain :

- (1) Penyediaan sarana pengolahan hasil perikanan yang memadai di sentra-sentra pengolahan.

Penyediaan sarana/peralatan standard pengolahan ikan asap yang diperuntukkan 39 orang pengolah ikan asap, di Kelurahan Waimhorock, Hamadi, Argapura, Imbi dan Tanjung Ria. Bantuan sarana tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan sarana pengolahan ikan asap sesuai standar peralatan pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) Asap.

Target bantuan yang diberikan pada tahun 2016, sebanyak 100 unit, terealisasi sebanyak 135 unit. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 577 unit dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 1000 unit, atau tercapai 57,70 persen.

Tidak tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sejak tahun 2012-2014, hanya dibiayai dari DAK yang jumlahnya terbatas tanpa dukungan sumber dana lain, seperti Dana OTSUS ataupun DAU. Selain itu, penetapan target kinerja, belum memperhatikan ketersediaan alokasi secara baik. Hal ini akan menjadi perhatian kami pada penyusunan RENSTRA SKPD 5 tahun berikut.

- (2) Terciptanya keragaman produk olahan bernilai tambah

Dalam pelayanan ini dilakukan ujicoba pengolahan produk baru untuk kemungkinan pengembangan ke depan. Pemilihan produk yang diujicobakan didasarkan pada ketersediaan bahan baku dan pasar yang tersedia. Terutama ketersediaan dan kesinambungan pasokan bahan baku, terutama hasil perikanan unggulan di Kota Jayapura, seperti ikan Ekor Kuning, Bandeng dan Lele.

Produk olahan yang diujicobakan/dipraktekkan adalah (1) Ikan ekor kuning asap cair; (2) Bakso Lele dan (3) Nugget Tuna. Ujicoba yang dilakukan adalah uji organoleptik untuk mengetahui pilihan dan tingkat penerimaan responden terhadap produk olahan dengan perlakuan tertentu berdasarkan karakteristik konsumen.

Maksud dari ujicoba/praktek ini sendiri adalah untuk mengetahui secara jelas tahapan proses pengolahan dan hal-hal teknis lainnya dalam proses produksi yang mempengaruhi hasil akhir produk. Selanjutnya hasil ujicoba akan dipraktekkan/dipelatihankan kepada pembudidaya/pengolah ikan asap dan ikan lele di Kota Jayapura.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebanyak 1 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 8 jenis dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 15 jenis, atau tercapai 53,33 persen.

Tidak tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan karena sejak tahun 2012-2014, belum difokuskannya upaya-upaya penganeekaragaman produk olahan, sehingga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan pada periode tersebut. Hal ini akan menjadi perhatian kami selanjutnya.

(3) Berkembang dan terbinanya jumlah SARPRAS pemasaran

Pelayanan dalam pengembangan dan pembinaan jumlah SAPRAS pemasaran secara spesifik, target indikatornya mengambang atau belum terukur secara jelas. Namun demikian, dengan memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan sarana pemasaran hasil perikanan yang telah dilakukan pada tahun 2016, dimana telah diadakan dan dibagikan 51 paket bantuan sarana pemasaran standard kepada pemasar hasil perikanan statis maupun bergerak (*mobile*). Bila dibandingkan dengan jumlah pemasar yang belum terbantu sebanyak  $\pm 300$  orang, maka upaya pemenuhan kebutuhan sarpras pemasaran tahun 2016 telah mencapai  $\pm 20\%$  sesuai target yang ditetapkan. Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebesar 20%, terealisasi juga sebesar 20%. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 125 persen dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebesar 70 persen, atau tercapai 125 persen. Tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan karena penetapan

target kinerja telah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan riil sarana pemasaran standard, yang harus dipenuhi.

(4) Berkembangnya jaringan dan distribusi pemasaran

Pelayanan dalam pengembangan jaringan dan distribusi pemasaran secara spesifik, target indikatornya mengambang atau belum terukur secara jelas. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan distribusi pemasaran hasil perikanan yang semakin terbuka, dimana munculnya lokasi-lokasi baru pemasaran hasil perikanan, seperti Saga Mall, Perempatan Koya Barat, Bandara Sentani (outlet ITCHIKO) dan Pasar Papua, dengan kapasitas terbatas, maka dapat dikatakan telah terjadi perkembangan jaringan dan distribusi pemasaran hasil perikanan, walaupun tingkatannya masih rendah, sekitar 5% saja.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebesar 25%, terealisasi sebesar 5%. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 85 persen dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebesar 100 persen, atau tercapai 85 persen.

Tidak tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan karena masih minimnya upaya-upaya memperluas jaringan dan distribusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh pola pemasaran produk hasil perikanan yang disesuaikan dengan keinginan pelaku usaha perikanan itu sendiri.

(5) Tersertifikasinya UPI dan produk perikanan

Upaya pelayan untuk mensertifikasikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) sampai tahun 2016 terus dilakukan. Fasilitasi penyediaan sarana pengolahan yang memadai terus dibenahi agar sesuai standard kelengkapan sarana suatu UPI. Tercatat pada tahun 2016, ada 19 UPI ikan asap yang telah dilengkapi sarana/peralatan standard pengolahan, namun upaya ini belum menghasilkan UPI yang tersertifikasi (memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan/SKP). Hal ini disebabkan ada faktor



wajib yang belum dipenuhi, yaitu (1) Penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP), (2) Memenuhi persyaratan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP), dan (3) Memenuhi *Good Hygiene Practices* (GHP).

Belum terpenuhinya faktor wajib tersebut karena kondisi internal dan eksternal dari UPI itu sendiri. Seluruh UPI berada pada lokasi pemukiman yang padat penduduknya, bahkan belum memiliki bangunan pengolahan yang representatif, serta prasarana lainnya yang masih sangat terbatas.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, sebesar 1 unit, tidak terealisasi (realisasi 0%). Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 0 UPI dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, sebanyak 12 UPI, atau tercapai 0 persen.

Tidak tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan karena seluruh Unit Pengolahan Ikan (UPI) termasuk produk olahannya belum memenuhi standard-standard suatu UPI yang baik, oleh sebab itu masih perlu pendampingan secara rutin dan berkala.

- (6) Terlaksananya operasional outlet pemasaran hasil perikanan
- Pelayanan melalui Operasional Outlet Pemasaran Hasil Perikanan, adalah pelayan rutin untuk meningkatkan fungsi fasilitas Outlet Pemasaran berupa; pelaksanaan fungsi pelayanan pelatihan, ujicoba, promosi dan pemasaran hasil perikanan.

Target pelaksanaan pada tahun 2016, selama 1 tahun, terealisasi juga selama 1 tahun. Realisasi Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, selama 5 tahun dari Target Kinerja RENSTRA SKPD 2012-2016, selama 5 tahun, atau tercapai 100 persen.

Tercapainya target RENSTRA ini, disebabkan karena dukungan maksimal oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

### **3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Pelayanan bidang ini difokuskan pada upaya untuk pengawasan untuk melindungi sumberdaya sumberdaya kelautan dan perikanan dan menurunkan angka pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan (*IUU Fishing*), serta pemulihan ekosistem pesisir dan laut.

a) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Pelayanan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui; patroli pengawasan sebanyak 17 kali dan pendampingan 5 POKMASWAS. Patroli pengawasan dilakukan secara berkala mencakup; aktifitas penangkapan, aktifitas budidaya, serta aktifitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Disamping itu, dalam rangka efisiensi tenaga dan biaya serta memaksimalkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan terutama perikanan tangkap, maka dilakukan pendampingan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk sinergitas dan memaksimalkan tanggungjawab mereka. Patroli ini juga dimaksudkan sebagai upaya penertiban Ijin Usaha Perikanan. Upaya ini berhasil menurunkan angka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan (*IUU Fishing*) sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Setiap kali melakukan patroli pengawasan selalu melibatkan kelompok masyarakat (SISMASWAS).

Untuk menunjang terciptanya iklim usaha yang kondusif, maka dilaksanakan juga penyuluhan/sosialisasi mengenai ijin usaha perikanan yang dilaksanakan di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Muara Tami.

Target pelaksanaan patroli pada tahun 2016, sebanyak 12 kali, terealisasi sebanyak 17 kali (141,67%). Target pendampingan POKMASWAS sebanyak 5 kelompok, realisasi sebanyak 5 kelompok (100%).

Pelayanan melalui pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan seluruhnya terlaksana lewat pembiayaan dari alokasi dana DAU TA.2016.

b) Perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan

Pelayanan dalam perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan lebih ditujukan untuk memulihkan ekosistem pesisir dan laut dalam rangka memaksimalkan fungsi ekosistem pesisir dan pengkayaan kembali sumberdaya ikan, serta melindungi keberlanjutan satwa langka. Dilakukan melalui penanaman pohon pantai, monitoring dan evaluasi rehabilitasi pesisir serta penyediaan sarana penetasan telur penyu.

Target pelaksanaan penanaman pohon pantai/mangrove pada tahun 2016, sebanyak 2700 pohon, terealisasi sebanyak 2700 pohon (100%). Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka item kegiatan ini mengalami penurunan dalam jumlah pohon yang ditanam sebesar 15%. Pada tahun 2015 jumlah pohon pantai yang ditanam adalah sebanyak 3110 pohon. Selain jumlah pohon menurun, luasan tanam pada tahun 2016 juga tidak bertambah karena metode yang digunakan adalah penyulaman atau mengganti pohon yang mati yang sudah ditanam ada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini terkait dengan alokasi pendanaan.

Target penyediaan sarana penetasan telur penyu pada tahun 2016 sebanyak 1 paket (bangunan dan peralatan), terealisasi 1 paket (bangunan dan peralatan sesuai perencanaan) (100%).

Selanjutnya, untuk menilai ketepatan dan permasalahan yang mungkin timbul dari pelaksanaan program/kegiatan terkait upaya pemulihan dan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemulihan yang telah dilakukan, baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Tujuannya mendapat masukan untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Pelayanan melalui perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan terlaksana lewat pembiayaan dari alokasi dana OTSUS TA.2016.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada Tabel 2.

### **2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Untuk itu setiap isu baik positif maupun negatif, perlu dicermati secara bijak, disikapi dengan baik, dan bila berpotensi negatif perlu dicari solusi pemecahannya.

Isu strategis yang ditemui pada tahun 2016, dan perlu dipikirkan solusinya pada setiap bidang pelayanan, diuraikan berikut ini.

#### **1. Bidang Produksi**

Bidang ini terdiri atas dua fungsi pelayanan yaitu seksi perikanan budidaya dan seksi perikanan tangkap. Sebagai bidang yang bertanggungjawab dalam penyediaan logistik ikan baik untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun bahan baku produk olahan, maka isu strategis pada bidang ini yang berpotensi positif dan negatif, perlu disikapi dengan baik karena berdampak luas terhadap penurunan/kenaikan tingkat konsumsi ikan serta keberlanjutan usaha olahan dan pemasaran.

##### **➤ *Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bidang Produksi:***

###### ***a. Kekuatan***

- 1) Tersedianya aparatur yang meski terbatas dalam kuantitas tetapi memadai dalam kualitas, sehingga menunjang dalam pendampingan, evaluasi, dan perencanaan;
- 2) Tersedianya sarana prasarana penunjang usaha pendampingan (kendaraan operasional roda 2 dan roda 4), sehingga memudahkan dalam pendampingan dan movev keberlanjutan pemanfaatan sarana atau keberlanjutan usaha;
- 3) Tersedianya RENSTRA SKPD, Data Statistik, Data Hasil Evaluasi, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja SKPD dan perencanaan, serta sinkronisasi program/kegiatan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah terkait pendanaan, mengingat keterbatasan APBD Kota Jayapura;
- 4) Adanya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, berupa alokasi program/kegiatan/dana dan penghargaan atas pencapaian prestasi,

sehingga memberi motivasi bagi nelayan dan pembudidaya untuk lebih meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha.

*b. Kelemahan*

- 1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga penyuluh perikanan, baik tangkap maupun budidaya, sehingga sangat mempengaruhi kontinuitas pendampingan;
- 2) Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap dan budidaya;
- 3) Kurangnya induk ikan berkualitas di BBIL akibat banyak induk dan calon induk yang mati karena kemarau panjang dan suplai air Bendungan Tami yang belum lancar/tidak sesuai kebutuhan perbenihan;
- 4) Kurangnya informasi dalam pemanfaatan teknologi (keterbatasan teknologi) yang dimiliki oleh masyarakat pembudidaya dan nelayan;
- 5) Akses ke lembaga penyedia modal (Perbankan dan Koperasi) belum maksimal.

*c. Peluang*

- 1) Permintaan pasar akan komoditi perikanan terus meningkat setiap tahunnya, seiring meningkatnya jumlah penduduk Kota Jayapura dan Kabupaten tetangga dan Kabupaten lain di pegunungan;
- 2) Adanya Program Pusat yang mendukung kegiatan perikanan di daerah (Kegiatan PUMM Budidaya, Program Minapolitan, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program INKAMINA);
- 3) Ketersediaan nelayan dan pembudidaya untuk tergabung dalam kelompok, sehingga lebih memudahkan dalam pendampingan dan MONEV pemanfaatan sarana bantuan dan perkembangan usaha;
- 4) Meningkatnya minat terhadap olahan hasil perikanan yang mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatnya permintaan komoditi ikan segar sebagai bahan baku utama;
- 5) Komoditi perikanan adalah komoditi yang tidak dibatasi usia, agama, maupun kesehatan.

*d. Ancaman*

- 1) Khusus perikanan budidaya terutama usaha kolam ikan, isu strategis yang terus menjadi permasalahan adalah setiap tahun suplai air bendungan tami tidak lancar/tidak sesuai kebutuhan produksi, hal ini menyebabkan produktivitas usaha sangat rendah bila dibandingkan dengan luasan yang tersedia (*exiting*);
- 2) Khusus untuk perikanan tangkap, dengan belum diaturnya PPI/TPI Hamadi dengan baik oleh Provinsi Papua, maka pendampingan dan pembenahan terhadap operasional penangkapan maupun pemasaran, dan pengendalian mutu hasil tangkapan belum dapat dilaksanakan dengan baik;
- 3) Konversi ekosistem mangrove tidak dikendalikan baik dan berlebihan;
- 4) Pemakaian bahan-bahan peledak baik bom, racun, potassium atau bahan peledak sejenisnya, sehingga merusak ekosistem terumbu karang dan ikan/biota lain yang bukan tujuan (mati sia-sia);
- 5) Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke badan sungai dan pesisir pantai masih kurang;
- 6) Khusus bagi nelayan dan pembudidaya lokal, keseriusan usaha dan kemauan untuk merubah perilaku usaha juga masih rendah, sehingga kalah bersaing dan berpotensi konflik sosial;
- 7) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah di bidang kelautan dan perikanan masih rendah.

➤ **Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun 2017, adalah :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas hasil tangkap dan budidaya pasca panen dari usaha nelayan dan pembudidaya, maka perlu dilakukan peningkatan SAPRAS produksi secara berkala dan berjenjang, yang disesuaikan dengan kebutuhan;

- b. Bahwa untuk lebih meningkatkan legalitas kelompok agar menunjang dalam akses perbankan dan program nasional, maka nelayan dan pembudidaya harus tergabung dalam kelompok agar mudah dalam pendampingan, selanjutnya perlu ditingkatkan menjadi Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbadan hukum (koperasi), untuk itu perlu sosialisasi dan pendampingan, serta sinkronisasi dengan instansi teknis terkait (PERINDAGKOP dan Perbankan);
- c. Bahwa untuk menunjang keberlanjutan usaha tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, serta menghasilkan komoditi perikanan yang sehat dan higienis, maka perlu meningkatkan kesadaran nelayan dan pembudidaya dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara ramah lingkungan dan bertanggungjawab serta penerapan cara budidaya ikan yang baik dan benar;
- d. Bahwa dengan memperhatikan luasnya cakupan wilayah pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya serta keterbatasan penyuluh, maka guna meningkatkan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya harus dilakukan melalui penerapan sistem pendampingan yang lebih komperensif sesuai kebutuhan (Sekolah Lapang, Pelatihan, Penyuluhan, Sosialisasi, dan Monev berkala) dengan metode pendekatan kelompok;
- e. Bahwa untuk menghasilkan komoditi perikanan yang berkualitas dengan meminimalisir biaya operasional, perlu dilakukan aplikasi dan ujicoba teknologi terapan yang muda dan murah sesuai potensi lokasi dan komoditi sasaran;
- f. Bahwa untuk menghasilkan ikan budidaya yang berkualitas yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu, perlu diadakan calon induk, benih, pakan, dan pupuk dalam jumlah yang memadai dan berkualitas sesuai spek yang ditentukan;
- g. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan rutinitas suplai air Bendungan Tami serta akselerasi pemberdayaan ekonomi nelayan dan pembudidaya, perlu dilakukan koordinasi aktif dengan Balai Besar Sungai Papua untuk pengaturan irigasi Bendungan Tami, BI

untuk pelaksanaan Cluster dan kerjasama dengan perbankan dalam akses modal usaha.

## **2. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

### **➤ *Koordinasi dan sinkronisasi program bidang P2HP***

Dengan memperhatikan keterbatasan pembiayaan APBD Kota Jayapura, maka selalu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program P2HP baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua maupun dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan khususnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan perikanan bidang PDSPKP selama ini sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan. Koordinasi dan sinkronisasi juga dilakukan dengan instansi teknis terkait, guna pengendalian mutu hasil perikanan, akses pemasaran, dan peningkatan kualitas kelembagaan usaha.

### **➤ *Isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bidang P2HP***

Bidang ini berperan penting dalam menaikkan angka konsumsi ikan, serta menaikkan nilai tambah dan nilai jual komoditi perikanan. Keberhasilan pelayanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dalam pengembangannya kedepan, selain dibatasi oleh sumberdaya yang dimiliki serta dihadapkan pada berbagai peluang yang tersedia, pelayanan bidang ini masih akan dihadapkan pada tantangan yang bersifat teknis maupun non teknis.

#### ***a. Kekuatan***

Kekuatan (strength) yang dapat dijadikan modal dasar dalam pelayanan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ke depan, adalah:

- 1) Adanya dukungan Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memperkuat dan mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 2) Tersedianya sarana penunjang usaha pemasaran hasil perikanan (outlet pemasaran hasil perikanan);



- 3) Produksi hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya terus meningkat, dimana hal ini sangat menunjang dalam penyediaan bahan baku;
- 4) Tersedianya teknologi pengolahan dan pengembangan produk nilai tambah hasil perikanan yang mendukung terciptanya diversifikasi olahan hasil perikanan;
- 5) Tersedianya pedoman standar mutu hasil perikanan sebagai pedoman kerja.

*b. Kelemahan*

Pelayanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga masih akan dihadapkan kepada beberapa kelemahan (weakness) yang harus disiasati dengan baik, sehingga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan perikanan di Kota Jayapura, yaitu :

- 1) Keterbatasan sumber dana dan sumber daya manusia dalam pembangunan perikanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penetapan skala prioritas, baik dalam menentukan lokasi maupun komponen kegiatannya;
- 2) Tidak tersedianya peralatan uji mutu hasil perikanan mengakibatkan pengujian mutu masih dilakukan di Dinas/Instansi lain yang berkompeten (Labkes Hewan, BPPOM, LPPMHP);
- 3) Keterbatasan permodalan dan investasi yang disebabkan manajemen usaha yang kurang baik dan pengetahuan akses sumber modal yang minim;
- 4) Aplikasi teknologi pengolahan hasil perikanan masih sangat sederhana, belum sesuai prosedur standar sehingga perlu penguatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan;
- 5) Rendahnya penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Kota Jayapura;
- 6) Adanya Peraturan perundangan yang tidak konsisten dan berubah setiap tahun;
- 7) Belum adanya jaminan untuk spesialisasi keahlian dibidang pengawasan mutu, sehingga diperlukan upaya untuk

mengembangkan jabatan fungsional, guna mendorong terbentuknya spesialisasi tenaga ahli di bidang pengawasan mutu.

*c. Peluang*

Pada sisi yang lain, diidentifikasi adanya peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan bidang ini untuk mendorong pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Jayapura, yaitu :

- a) Ketersediaan produksi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya di Kota Jayapura dan belum dikelola secara optimal;
- b) Tersedianya jumlah tenaga kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan perluasan lapangan kerja ;
- c) Tingginya permintaan produk perikanan dalam memenuhi permintaan antara industri kecil pengolahan dan permintaan akhir dalam bentuk konsumsi masyarakat ;
- d) Dikembangkannya Program Nasional seperti GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), Sistem Rantai Dingin (*Cool Chain System*) dan Sentra Pengolahan;
- e) Mulai bertumbuhnya investasi perikanan dibidang pasca produksi;
- f) Berkembangnya Teknologi Pengolahan dan Pasca Produksi;
- g) Terbukanya akses kredit modal kerja bagi UMKM;
- h) Adanya dukungan pihak ketiga, khususnya BUMN melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

*d. Ancaman*

Sementara itu, ancaman (*threat*) yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan pembangunan perikanan khususnya pelayanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ke depan, yaitu :

- a) Globalisasi perdagangan (AFTA, MEA, dll) yang sangat berpotensi menaikkan tensi persaingan usaha;
- b) Standarisasi mutu hasil perikanan yang cukup tinggi;
- c) Belum adanya kesiapan pelaku usaha pengolahan guna mengantisipasi perkembangan dan persaingan kedepan;

➤ ***Rekomendasi dan Catatan Strategis.***

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Perda Kota Jayapura Nomor 5 tahun 2016, sehingga nama bidang ini berubah menjadi Bidang Pengutan Daya Saing Produk Perikanan. Namun demikian tetap ada rekomendasi dan catatan yang strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan sentra pengolahan yang berimplementasi pada meningkatnya ragam dan volume produk olahan hasil perikanan, maka perlu dilakukan peningkatan SARPRAS pengolahan disentra pengolahan serta pengembangan diversifikasi produk olahan bernilai tambah.
  - b. Bahwa dalam rangka pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di pasaran secara berkala sangat penting dilakukan. Sertifikasi UPI merupakan salah satu langkah dalam menerapkan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan.
  - c. Bahwa dalam rangka penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan perlu dilakukan penguatan sarpras pemasaran, dan jaringan pemasaran hasil perikanan. Sedangkan guna mempromosikan produk perikanan Kota Jayapura terutama produk olahan perlu mengembangkan promosi GEMARIKAN.
  - d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kemampuan dan keterampilan SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan maka penyuluhan/sosialisasi sangat penting dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP)**
- Sebagai bidang yang bertanggungjawab dalam pengendalian kualitas dan kuantitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, serta pemulihan kualitas perairan dan ekosistem pesisir sebagai penupang “aliran energi” di dalam perairan itu sendiri, maka isu strategis pada bidang ini yang berpotensi positif dan negatif, perlu disikapi dengan baik karena berdampak luas terhadap penurunan/kenaikan sumberdaya ikan

di dalamnya dan pendapatan masyarakat pesisir yang bergantung kepada sumberdaya tersebut secara berkelanjutan.

➤ ***Isu-isu strategis dari bidang P2SDKP, adalah :***

***a. Kekuatan***

- 1) Tersedianya sumberdaya aparatur yang memadai;
- 2) Tersedianya 1 orang PPNS Perikanan;
- 3) Tersedianya armada darat dan laut yang memadai;
- 4) Tersedianya sarana komunikasi pengawasan (radio SSB) yang memadai;
- 5) Adanya dukungan Pemerintah daerah dalam memperkuat dan mengembangkan sitem pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan Kota Jayapura;
- 6) Adanya PERDA No. 8 Tahun 2010 perubahan atas PERDA No.1 Tahun 2008 Tentang Ijin Usaha Perikanan;
- 7) Adanya hasil kajian Kawasan Konservasi Laut Daerah yang menghasilkan jenis konservasi yang sesuai bagi biota penyu di kawasan Skouw;
- 8) Adanya luasan dan bangunan pemeliharaan sementara telur dan tukik penyu, serta kepedulian masyarakat Skouw terhadap keberlanjutan biota penyu.

***b. Kelemahan***

- 1) Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi interen bidang, terutama dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Jumlah PPNS perikanan hanya 1 sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengawasan maupun koordinasi dengan stakeholder terkait;
- 3) Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur dalam mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Kota Jayapura, sehingga menyulitkan dalam kebijakan perencanaan selanjutnya;

- 4) Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder terkait tentang sinkronisasi program/kegiatan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 5) Belum tersedia peta/data tentang luasan tutupan ekosistem karang dan mangrove sehingga menyulitkan dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait pemulihan ekosistem;
- 6) Belum tersedia data kualitas perairan Teluk Youtefa (bagian dalam) yang kontinyu setiap tahun sehingga menyulitkan dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait pengendalian kualitas ekosistem dan perairan Teluk Youtefa;
- 7) Belum tersedianya SAPRAS pendukung operasional bangunan pemeliharaan telur dan tukik penyu;

*c. Peluang*

- 1) Adanya dukungan dari TNI Angkatan Laut, POL.Air, SATKER Pengawasan Perikanan Jayapura dalam pengawasan dengan ikut aktif dalam melakukan patroli laut;
- 2) Adanya dukungan dari Badan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kelas 1 Jayapura dalam mengendalikan kualitas dan legalitas komoditi perikanan yang diperdagangkan, sehingga tugas PPNS dalam pengawasan;
- 3) Adanya dukungan POKMASWAS dan masyarakat pesisir meskipun belum maksimal dalam menunjang pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan dan pemulihan ekosistem pesisir;

*d. Ancaman*

- 1) Konversi ekosistem mangrove masih tidak dikendalikan baik dan berlebihan;
- 2) Pemakaian bahan-bahan peledak baik bom, racun, potassium atau bahan peledak sejenisnya, sehingga merusak ekosistem terumbu karang dan ikan/biota lain yang bukan tujuan (mati sia-sia);

- 3) Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke badan sungai dan pesisir pantai masih sangat kurang;
- 4) Belum adanya regulasi yang memadai dalam mengatur tentang jenis limbah yang boleh terbuang ke badan sungai yang bermuara ke laut;
- 5) Kurangnya pemahaman dan ketidakpedulian adat terhadap kondisi ekosistem dan perairan Teluk Yotefa, sehingga terjadi pengrusakan ekosistem dan sumberdaya ikan di dalamnya, serta menyulitkan dalam pengendalian pemanfaatan;
- 6) BPTSP sebagai badan yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Perikanan, tidak melakukan sinkronisasi dan koordinasi perijinan dengan baik, sehingga menyulitkan dalam pemberian rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan di lapangan;
- 7) Belum adanya aturan adat yang menjamin peruntukan kawasan untuk kegiatan konservasi, pemafaatan biota penyu untuk menjamin keberlanjutannya.

➤ ***Rekomendasi dan Catatan Strategis.***

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Perda Kota Jayapura Nomor 5 tahun 2016, bidang ini pada tahun 2017 sudah tidak lagi dikelola oleh SKPD Kabupaten/Kota. Meskipun demikian beberapa tupoksinya masih dilaksanakan oleh seksi pada bidang yang lain sehingga perlu diberikan rRekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang perencanaan program/kegiatan terkait pemulihan ekosistem Teluk Youtefa secara terukur dan terencana baik untuk menunjang keberlanjutan sumberdaya perikanan di dalamnya, maka perlu menyediakan peta/data dasar tentang luasan tutupan ekosistem karang dan mangrove (kondisi terakhir) sebagai dasar perencanaan selanjutnya;
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian kualitas perairan Teluk Youtefa dan penumpukan bahan organik yang berdampak pada penurunan

kualitas perairan dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di dalamnya, serta melindungi pemanfaat sumberdaya perikanan tersebut dan pendapatan nelayan setempat, maka perlu dilakukan pemeriksaan kualitas perairan Teluk Youtefa secara kontinyu dalam tahun berjalan;

- c. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengendalian kualitas dan legalitas komoditi perikanan yang diperdagangkan, maka perlu menambah jumlah PPNS perikanan Kota Jayapura minimal 1 orang lagi menjadi 2 orang;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan serta pemulihan ekosistem dan perairan laut, maka dibutuhkan Bimbingan Teknis bagi Aparatur tentang; teknik perencanaan pengawasan dan pelaporan, teknik mengukur dan melaporkan luasan tutupan karang dan mangrove, serta teknik pengambilan sampel untuk pengujian kualitas perairan dan pelaporan;
- e. Bahwa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kepedulian pemangku adat dan pemilik Hak Ulayat terhadap kondisi ekosistem pesisir Teluk Youtefa dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di dalam, maka perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi secara berkala dan kontinyu, serta perlu juga dilibatkan dalam POKMASWAS;
- f. Bahwa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem pesisir Teluk Youtefa dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di dalam serta penanggulangan dini terhadap bencana alam laut, maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan kontinyu, dan juga pemasangan papan bicara di beberapa lokasi strategis sesuai kebutuhan;
- g. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan yang ramah lingkungan, maka dalam penerbitan Ijin Usaha Perikanan perlu mendapat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura, terkait dengan hal tersebut maka Standart Operasional Pelayanan pengurusan Ijin BPTSP perlu ditinjau kembali;

- h. Bahwa dalam rangka mengatasi maraknya penggunaan bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan perlu dilakukan penegakan aturan dengan memaksimalkan tugas dan fungsi PPNS, maka perlu penambahan biaya operasional pengawasan;
- i. Bahwa rangka mendukung kepedulian masyarakat Skouw terhadap keberlanjutan Biota Penyu, serta memaksimalkan kawasan Skouw sebagai Kawasan Konservasi Biota Penyu dan mengoptimalkan fungsi bangunan pemeliharaan tukik, maka perlu pendampingan terhadap masyarakat peduli konservasi penyu dan melengkapi SAPRAS penunjang operasional bangunan pemeliharaan tukik.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Mengingat RENSTRA SKPD berakhir pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 merupakan tahun peralihan, masa perencanaan dan penyusunan RENSTRA yang menyesuaikan Visi dan Misi Walikota terpilih, maka penyusunan RENJA untuk menganalisis kebutuhan tahun 2018 masih tetap mengacu pada target dan capaian kinerja pelayanan tahun 2016, dengan penyesuaian-penyesuaian awal pada struktur OPD terbaru dan target indikator-indikator capaian program/kegiatan yang lebih spesifik, terarah, dan terukur. Penyesuaian indikator ini memperhatikan potensi sumberdaya (Dana, SDM, Sarpras, dukungan pihak ketiga, dll) yang dimiliki, serta sifat, tujuan, dan sasaran dari kegiatan dan item kegiatan itu sendiri.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses perencanaan program/kegiatan tentunya juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak khususnya masyarakat perikanan. Usulan-usulan tersebut diperoleh pada saat kegiatan pembinaan dan pendampingan, pelatihan, sosialisasi maupun pada saat MUSRENBANG. Usulan-usulan tersebut dianalisis secara lebih komprehensif kesesuaiannya dengan kondisi riil lapangan, pencapaian sasaran



pembangunan kelautan dan perikanan Kota Jayapura tahun 2018, dan RTRW Kota Jayapura.

Usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 4.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan perikanan secara nasional mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 05/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019. Kebijakan pembangunan perikanan secara Nasional difokuskan pada peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Mengingat RENSTRA OPD yang masih dalam tahap perencanaan dan penyusunan di tahun 2017 ini maka pada bagian ini hanya dapat disampaikan tentang Visi, Misi dan Arah Kebijakan Nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

##### a. Visi

Visi KKP - RI pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 adalah *"Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan Nasional"*.

##### b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi diatas, maka misi yang diemban adalah:

- 1) **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 3) **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

*c. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional*

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector sector strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### a. Tujuan

Dengan berakhirnya RENSTRA SKPD pada tahun 2016 dan masa perencanaan serta penyusunan RENSTRA SKPD pada tahun 2017, maka Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 disusun dengan masih merujuk pada pencapaian target yang telah dilaksanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura Tahun 2012 - 2016, dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat perikanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari Renja OPD Dinas Perikanan Tahun 2018, adalah :

- a) Peningkatan produksi perikanan yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat kebutuhan pasar berbasis komoditas unggulan secara optimal dan berkelanjutan.
- b) Peningkatan tingkat konsumsi Ikan masyarakat Kota Jayapura;
- c) Peningkatan nilai tambah dan nilai jual komoditi dan produk perikanan lokal.
- d) Pengembangan tata niaga ikan guna menunjang distribusi pemasaran produk perikanan dan produktivitas usaha perikanan (budidaya, penangkapan dan olahan hasil perikanan);
- e) Penurunan kasus penangkapan ikan dengan bahan berbahaya dan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan legalitas usaha;
- f) Peningkatan kualitas perairan dan ekosistem pesisir, serta perlindungan biota langka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan implementasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pelaku usaha perikanan secara berkelanjutan;
- g) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan (pelaku usaha dan aparatur perikanan).
- h) Pengembangan sitem perencanaan serta informasi kelautan dan perikanan yang akuntabel dan terbarukan.

**b. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari Renja OPD Dinas Perikanan Tahun 2018, adalah :

- a) Meningkatkan sarana prasarana produksi komoditi dan produk perikanan (budidaya, penangkapan pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan) secara berkelanjutan;
- b) Meningkatkan ragam dan produksi olahan hasil perikanan, serta volume pemasaran secara berkelanjutan;
- c) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan masyarakat pesisir/adat) serta aparatur perikanan secara berjenjang dan komperensif sesuai kebutuhan;
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan dan pembudidaya dalam mengelola sumberdaya perikanan secara rasional dan bertanggung jawab;
- e) Meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan mikro (pembudidaya, nelayan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan) secara berkelanjutan;
- f) Meningkatkan sistem perencanaan berkualitas sesuai tahapan dan kondisi real yang terukur dan tepat kebutuhan;
- g) Meningkatkan sitem informasi teknologi dan pembangunan perikanan yang mudah diakses, akuntabel, dan terbarukan.

**3.3. Progam dan Kegiatan**

Program/kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2018, merupakan program/kegiatan yang disusun mengacu pada pencapaian pelaksanaan RENSTRA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012 - 2016. Program/kegiatan tersebut juga disinergikan dengan prioritas pembangunan perikanan tingkat provinsi dan nasional, serta memperhatikan target-target capaian tahunan. Selain itu, perencanaan program/kegiatan tersebut juga memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang dilatarbelakangi isu-isu strategis yang berkembang dan proyeksi kedepan. Dilakukan juga penyesuaian terhadap

nomenklatur program/kegiatan dengan mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan-perubahannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2018 di implementasi dalam 4 program dan 13 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

**1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Tujuan program ini adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran meningkatkan volume (*quantity*), mutu (*quality*) dan nilai (*value*). Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diupayakan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya;
- 2) Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Kesehatan Ikan;
- 3) Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- 4) Pengembangan Kampung Koya Kosso sebagai Kampung Lele; dan
- 5) Revitalisasi Operasional Balai Benih Ikan Lokal.

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Budidaya dan Balai Benih Ikan Lokal Kota Jayapura.

**2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Tujuan program ini adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran meningkatkan volume (*quantity*) melalui optimalisasi *catch per unit effort* (CPUE), mutu (*quality*) dan nilai (*value*). Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diupayakan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- 2) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Perikanan Tangkap.

**3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Tujuan program ini adalah meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk dan akses pemasaran hasil

perikanan, dengan sasaran peningkatan volume, mutu dan nilai jual komoditi perikanan dan produk olahan hasil perikanan. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Perkembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan;
- 2) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 3) Fasillitasi Perkembangan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- 4) Operasional UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Unit organisasi penanggungjawab program adalah Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

#### **4) Program Pengembangan Data/Informasi Kelautan dan Perikanan**

Tujuan program ini adalah meningkatkan sistem perencanaan guna menunjang akselerasi pembangunan perikanan secara berkelanjutan dan tepat kebutuhan. Sasaran yang ingin dicapai adalah akurasi data dan feedback (kritik dan saran) guna peningkatan ketepatan perencanaan dan penganggaran. Tujuan dan sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan :

- 1) Penyediaan Data dan Infomasi Perikanan.

Unit organisasi penanggungjawab program adalah ketiga bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikoordinir oleh Sekretariat Dinas (SETDIS).

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan prakiraan maju tahun 2018, tersaji pada Tabel 5 dan 6.

## **BAB IV. PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jayapura tahun 2018, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2018.

Jayapura, Maret 2017  
KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA

ELSYE P. RUMBEKWAN, S.Pi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196508281997122001





